

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis terhadap perilaku korupsi perusahaan di Indonesia. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan perilaku korupsi perusahaan, yang dapat dijelaskan bahwa semakin lama proses penerbitan izin dan lisensi semakin tinggi atau semakin cenderung terjadinya perilaku korupsi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Djankov *et al.* (2003) yang menggunakan data perusahaan di 109 negara dan Svensson (2005) yang menggunakan data perusahaan-perusahaan di Uganda, bahwa korupsi yang tinggi terjadi karena pendaftaran bisnis membutuhkan waktu yang lama. Demikian juga dengan penelitian Shleifer & Vishny (1993), menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan yang banyak memberikan wewenang kepada pejabat untuk menolak pemberian izin dan mengumpulkan uang suap.

Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis yang lebih lama, banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan kategori besar, perusahaan dengan kepemilikan swasta dalam negeri lebih besar dan perusahaan yang lebih lama beroperasi di Indonesia. Hal yang sama juga dialami oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas kinerja yang lebih besar.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perilaku korupsi perusahaan dipengaruhi secara positif oleh lamanya pengurusan izin dan lisensi bisnis yang diperkuat oleh karakteristik perusahaan dan kualitas kinerja perusahaan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar kepemilikan swasta dalam negeri, dan semakin lama perusahaan beroperasi di Indonesia semakin tinggi tingkat perilakunya. Dengan demikian kecenderungan perilaku korupsi di Indonesia semakin kuat pada perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Penelitian ini mendukung penelitian Nguyen (2020), bahwa peningkatan ukuran perusahaan sebenarnya menyebabkan korupsi yang lebih besar, beban korupsi dirasakan tinggi pada perusahaan kecil dan berkurang ketika perusahaan meningkat menjadi menengah dan besar. Penelitian Yusof & Arshad (2020) menemukan bahwa perusahaan yang paling besar, cenderung menjadi target pembayaran suap. Dalam hal kepemilikan, penelitian Hanousek *et al.* (2017) menemukan bahwa perusahaan dengan mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh swasta dalam negeri lebih banyak melakukan korupsi daripada perusahaan yang mayoritas kepemilikannya di dimiliki oleh asing. Perilaku ini kemungkinan terjadi karena budaya lokal menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka mereka menjadi bagian dari budaya tersebut.

Sejalan dengan pengaruh karakteristik perusahaan, kualitas kinerja perusahaan juga memperkuat perilaku korupsi perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kualitas kinerja perusahaan, maka semakin tinggi perilaku korupsi perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha mempertahankan kualitas kinerjanya dan agar perusahaan tetap eksis walaupun ada hambatan dalam pengurusan izin dan lisensi bisnis tersebut.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Svensson (2003), Clarke & Xu (2004), dan Nguyen (2020) bahwa semakin tinggi laba perusahaan saat ini dan di masa depan, semakin banyak suap yang harus dibayar. Selain itu perusahaan yang menguntungkan lebih suka membayar suap dan umumnya membayar dalam jumlah yang lebih tinggi dan bahkan menghabiskan lebih banyak waktu oleh manajemen untuk berinteraksi dengan pejabat publik.

B. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini adalah : pertama, informasi tentang perilaku korupsi pada tingkat perusahaan dalam melakukan bisnis di Indonesia belum banyak diungkapkan dan penelitian mengenai faktor penentu perilaku korupsi perusahaan di Indonesia belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini secara keseluruhan memperoleh hasil bahwa lamanya pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis menjadi faktor penentu terjadinya perilaku korupsi oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.

Kedua, penggunaan konsep hubungan dalam bentuk model persamaan struktural dan persamaan ekonometrika yang digunakan dalam menganalisis perilaku korupsi dapat mengisi bagian yang belum dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hubungan antar variabel pada persamaan model struktural yang digunakan dijabarkan dalam bentuk persamaan linear yang memberikan hasil kontribusi masing-masing variabel dalam mempengaruhi perilaku korupsi perusahaan. Penelitian sebelumnya yang membahas perilaku korupsi lebih banyak menggunakan metode regresi probit, order, dan regresi interval (Svensson, 2003; Wu, 2009), analisis *cross-sectional* indeks persepsi korupsi (Tanzi, 1998b; Treisman, 2000), menggunakan teknik analisis regresi (Jiang & Nie, 2014; Wu, 2005; William *et al.* 2014).

Ketiga, hasil penelitian yang diperoleh yaitu lamanya pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis sebagai faktor penentu korupsi sebagai hasil empiris dari penelitian ini dapat menambah referensi mengenai penentu perilaku korupsi perusahaan di dalam suatu negara. Dan karakteristik perusahaan dan kualitas kinerja perusahaan dapat memperkuat perilaku korupsi perusahaan dalam pengurusan penerbitan izin dan lisensi bisnis. Penelitian sebelumnya yang meneliti penentu korupsi perusahaan memperoleh beragam temuan, seperti peraturan yang tidak tepat dan legitimasi politik adalah salah satu penentu korupsi di China (Jiang & Nie, 2014). Jenis perdagangan dan operasi bisnis perusahaan merupakan penentu korupsi di Uganda (Svensson, 2003), dan Tanzi (1998b) memperoleh hasil bahwa penentu korupsi di negara-negara di dunia dari tahun 1995-1998 adalah kualitas birokrasi dan tingkat gaji pada sektor publik. Selanjutnya penelitian Wu (2009) dan Williams *et al.* (2016) mendapatkan hasil bahwa keberadaan regulasi, pajak yang tinggi, dan usaha untuk mendapatkan kontrak pemerintah adalah penentu korupsi perusahaan-perusahaan di Asia dan 132 negara-negara berkembang, serta birokrasi, korupsi peradilan, dan kejahatan dari rejim yang berkuasa sebagai bagian dari penentu korupsi di 41 negara berkembang (Webster & Piesse, 2018).

C. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak awal memulai bisnis di Indonesia telah dihadapkan dengan pelayanan dalam penerbitan izin yang tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah hendaknya melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek yang dapat membuka peluang lembaga-lembaga pemberi izin untuk melakukan korupsi. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain informasi yang jelas dan transparan tentang prosedur perizinan. Menurut Burger *et al.* (2015) informasi dan prosedur penerbitan izin dan lisensi yang tidak jelas menciptakan lingkungan ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang dimanfaatkan oleh pejabat korup untuk meminta secara tidak adil perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi atau berupaya berada di sektor formal. Pengurangan prosedur dan lembaga yang terlibat dalam pengurusan izin dan lisensi bisnis menjadi maksimal 3 prosedur dan lembaga perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan sehingga adanya kecepatan dan ketepatan waktu dalam memulai dan melakukan bisnis di Indonesia.

Langkah pencegahan selanjutnya adalah penggunaan sistem atau teknologi informasi terintegrasi yang dapat mengurangi interaksi antara pemberi layanan dan pengguna layanan perizinan. Adanya standar yang dapat diketahui dan diakses oleh semua pengguna layanan. Menurut Tanzi (1998) desentralisasi pemerintahan membuat orang lebih cenderung korupsi karena segmen yang lebih kecil dalam pemerintahan yang memberi peluang yang lebih besar untuk korupsi berkembang. Perlu dilakukan sinkronisasi peraturan dan penerapannya baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar kementerian ataupun lembaga, Pengelolaan basis data perizinan yang terintegrasi dan dapat diandalkan dapat mengurangi peluang bagi berbagai pelanggaran hukum dan praktik korupsi dalam tata kelola perizinan.

Institusi pencegahan korupsi di Indonesia perlu memberi perhatian dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan yang telah lama beroperasi di Indonesia tersebut. Selain itu pentingnya pengawasan terhadap pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis yang diberikan oleh institusi terkait kepada pengguna layanan. Pengawasan yang dilakukan haruslah pengawasan secara aktif, represif dan preventif. Penetapan standar dan pengukuran kegiatan yang dapat dipantau setiap saat memungkinkan penyelewengan dapat dikurangi.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Data *World Bank Enterprises Survey* yang digunakan dalam penelitian ini tidak menjelaskan atau menyebutkan kapan terjadinya peristiwa penyuaipan (diawal, selama proses atau diakhir) yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengurusan penerbitan izin dan lisensi bisnisnya.
2. Tidak dapat membandingkan penentu korupsi tahun 2009 dan 2015 karena adanya perubahan kriteria variabel untuk tahun 2015.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku korupsi perusahaan di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa pelayanan penerbitan izin dan lisensi bisnis merupakan hal yang dapat menjadi bagian penentu korupsi secara positif diperkuat oleh kualitas kinerja perusahaan dan karakteristik perusahaan. Kedepannya, diharapkan semakin banyak penelitian-penelitian mengenai penentu korupsi dari variabel, sumber data dan teknis analisis yang berbeda (seperti bentuk badan usaha) agar terdapatnya kesepakatan terhadap penentu perilaku korupsi perusahaan-perusahaan pada umumnya dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya.
2. Penelitian ini menggunakan teknis analisis *Covarian Based Structural Equation Model* (CB-SEM) yang merupakan teknis analisis yang digunakan untuk mengkonfirmasi teori-teori dan literatur yang telah ada. Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan teknis analisis *Partial Least Square Structural Equation Model* (PLS SEM) yang merupakan teknis analisis yang bertujuan untuk mengembangkan teori dalam penelitian eksplorasi yang berfokus menjelaskan variabel penelitian.